

Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pendahuluan

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional yang terdiri atas sepuluh negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Rakyat Demokratik (RRD) Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan sosial dan budaya di wilayah ini, serta memelihara perdamaian dan stabilitas wilayah.

Tabel 1
Anggota ASEAN dan Tanggal Keanggotaannya

Brunei Darussalam	8 Januari 1984
Kamboja	30 April 1999
Indonesia	8 Agustus 1967
RRD Laos	23 Juli 1997
Malaysia	8 Agustus 1967
Myanmar	23 Juli 1997
Filipina	8 Agustus 1967
Singapura	8 Agustus 1967
Thailand	8 Agustus 1967
Vietnam	28 Juli 1995

Lebih dari 40 tahun keberadaannya, ASEAN telah menandatangani banyak deklarasi dan pernyataan yang menyatukan tujuan-tujuan dan kesepakatan-kesepakatan perhimpunan ini. Namun ASEAN mendapat kritik tajam karena kemajuannya lambat dan kegagalannya menangani isu-isu kontroversial seperti hak asasi manusia (HAM). Cara-cara menghadapi masalah seperti ini membuat perhimpunan negara-negara Asia Tenggara tersebut mendapat julukan “Cara ASEAN”, atau diplomasi berdasar konsultasi dan konsensus tanpa campur tangan.

Namun untuk menjawab kritik tersebut dan sekaligus membuat ASEAN lebih dinamis, dalam sepuluh tahun belakangan ini perhimpunan bangsa-bangsa ini meluncurkan proyek-proyek yang lebih ambisius.

Pada Desember 1997, Visi ASEAN 2020 diluncurkan. Visi ini merumuskan sebuah tujuan strategis bagi Perhimpunan ini dan mengundang kerja sama yang kokoh di antara anggota-

anggotanya menuju terciptanya “sebuah komunitas yang peduli”. Upaya ini menempuh serangkaian rencana tindakan untuk mulai bekerja menuju visi yang dirumuskan dalam Visi ASEAN 2020. Rencana-rencana tindakan ini menjelaskan kebijakan dan proyek khusus yang akan dilaksanakan oleh anggota-anggota ASEAN guna mewujudkan tujuan kerja sama dan masyarakat (komunitas). Rencana-rencana tersebut melingkupi masa enam tahun dan akan ditinjau setiap tiga tahun. Rencana yang pertama adalah *Hanoi Plan of Action* yang dilaksanakan dari tahun 1998-2004. Dan rencana yang saat ini sedang berjalan adalah *Vientiane Action Programme (VAP)* dari 2004-2010.

Pada KTT ke-9 di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dalam kesepakatan tersebut, para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka mendirikan Masyarakat ASEAN dan menentukan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai tiga pilar Masyarakat ASEAN. Kesepakatan tersebut membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*).

Pada 20 November 2007, ketika KTT ke-13 ASEAN digelar di Singapura, para pemimpin ASEAN menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA*). Penandatanganan kedua dokumen tersebut menandai pengaturan yang lebih formal bagi ASEAN, dan menyatakan kesepakatan tersebut berdasarkan aturan main ASEAN.

Piagam ASEAN adalah konstitusi bagi organisasi regional ASEAN, seperti halnya Undang-undang Dasar bagi sebuah negara. Piagam ini berisi prinsip dasar dan tujuan organisasi, menentukan struktur dan moda-moda keanggotaannya dan tata laksana organisasi. Sementara itu, cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan rencana pembangunan strategis atau jangka panjang ASEAN yang akan merinci kebijakan-kebijakan dan proyek yang akan diwujudkan dalam masa yang telah ditentukan. Di ASEAN, cetak biru MEA itu merupakan satu dari tiga rencana yang akan digunakan untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN. Dua rencana lainnya adalah cetak biru Masyarakat Politik-Pertahanan ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya yang masih akan dirumuskan.

Apakah Piagam ASEAN?

Piagam ASEAN adalah sebuah kesepakatan untuk menyusun kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN. Piagam ini terdiri atas tiga pasal, 55 ayat, dan empat lampiran. Struktur dan kesepakatan-kesepakatan penting dalam Piagam tersebut dirinci dalam Tabel 2. Sementara Piagam ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN, Piagam tersebut masih harus diratifikasi oleh tiap anggota menurut proses ratifikasi dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Piagam tersebut memberikan ASEAN posisi legalnya, juga mengklasifikasi perjanjian-perjanjian dan deklarasi ASEAN sebelumnya, memastikan kembali prinsip-prinsip jangka panjang masyarakat, kerja sama, konsultasi dan konsensus, termasuk tujuan khusus dari tiga Masyarakat ASEAN seperti telah dijelaskan di atas. Piagam ASEAN ini merumuskan pula

pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN dan bagaimana ASEAN berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta organisasi-organisasi internasional lainnya.

Bagian terbesar dari Piagam ASEAN diperuntukkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ASEAN sendiri, identifikasi tujuan-tujuan dan prinsipnya, serta hubungan di antara para anggotanya, menjelaskan soal-soal keanggotaan, dan fungsi-fungsi yang pasti serta tanggung jawab setiap organ ASEAN. Piagam ini menciptakan birokrasi formal ASEAN yang baru, termasuk hal-hal berikut ini:

- Dewan Koordinasi ASEAN yang terdiri atas pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN dua kali dalam setahun;
- Dewan Masyarakat ASEAN: Dewan Politik-Pertahanan ASEAN, Dewan Ekonomi ASEAN, dan Dewan Sosial-Budaya ASEAN;
- Komite Perwakilan Tetap ASEAN, terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh anggota-anggota ASEAN dengan peringkat duta besar, dan berkedudukan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan
- Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, kerangka acuannya akan ditentukan oleh Pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN.

Beberapa perubahan juga terjadi dalam beberapa organ ASEAN yang selama ini ada, seperti:

- Penyelenggaraan KTT ASEAN dua kali dalam setahun, dari yang sekarang diselenggarakan hanya satu kali dalam setahun;
- Akan ada kepemimpinan tunggal untuk badan-badan ASEAN tingkat tinggi yang penting. Hal ini berarti negara yang menjadi ketua ASEAN untuk tahun berjalan akan menjalankan kepemimpinan dari badan-badan resmi ASEAN, dan
- Definisi ulang dan penguatan peran-peran Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.

Tabel 2
Panduan Ringkas Piagam ASEAN

<i>Pasal</i>	<i>Perihal</i>	<i>Pembahasan Penting</i>
	Pembukaan	Pembukaan adalah sebuah pernyataan pengantar yang menjelaskan alasan-alasan disusunnya Piagam dan berisi tujuan penting yang akan dicapai. Piagam ini juga mencakup sejarah perjalanan “pengakuan untuk dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar”.
I	Tujuan dan Prinsip	Pasal ini berisi 15 tujuan ASEAN termasuk pembentukan sebuah pasar tunggal dan basis produksi, serta promosi identitas ASEAN. Piagam ini juga berisi 14 prinsip, yang menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tercakup dalam deklarasi-deklarasi dan kesepakatan-kesepakatan yang ada.
II	Aspek Legal Kelembagaan	Piagam ini berisi aspek legal lembaga ASEAN
III	Keanggotaan	Pasal ini menjelaskan keanggotaan ASEAN, hak-hak

		dan kewajiban anggota, dan bagaimana anggota-anggota baru diakui.
IV	Organ-organ	Pasal IV menjelaskan badan-badan resmi ASEAN dan struktur serta fungsi masing-masing badan tersebut. Badan-badan baru yang dimandatkan adalah Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-dewan Masyarakat ASEAN, Komite Perwakilan Tetap ASEAN, dan Badan Hak-hak Asasi Manusia.
V	Pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN	Bab ini menjelaskan pihak-pihak yang berasosiasi dengan ASEAN, dan memberi mandat kepada Komite Perwakilan Tetap untuk menyusun aturan prosedur dan kriteria untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak-pihak tersebut
VI	Kekebalan dan Keistimewaan	Pasal ini memaparkan kekebalan dan keistimewaan ASEAN sebagai kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kekebalan dan Keistimewaan ini akan dicakup dalam kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang terpisah.
VII	Pembuatan Keputusan	Pasal ini menegaskan konsultasi dan konsensus sebagai cara utama dalam pembuatan keputusan.
VIII	Penyelesaian Sengketa	Prinsip-prinsip umum mengamankan konsultasi dialog dan perundingan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa-sengketa yang tidak terselesaikan akan dirujuk ke KTT ASEAN untuk mendapatkan keputusan.
IX	Anggaran dan Pendanaan	Anggaran operasional ASEAN harus sesuai dengan kontribusi tahunan para anggotanya secara setara.
X	Administrasi dan Prosedur	Kepemimpinan ASEAN bergilir setiap tahunnya. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan ASEAN
XI	Identitas dan Lambang-lambang	“Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat” adalah semboyan ASEAN.
XII	Hubungan-hubungan Eksternal	Koordinator-koordinator dialog mendapat mandat untuk mewakili ASEAN dan menjadi wakil ketua dalam pertemuan-pertemuan dengan Mitra Dialog.
XIII	Keadaan Umum dan Akhir	Ratifikasi Piagam ASEAN akan disesuaikan dengan prosedur internal tiap Anggota. Sementara Piagam ASEAN dapat ditinjau kembali lima tahun setelah diberlakukan.
Lampiran 1	Badan-badan Kementrian Sektoral ASEAN	Lampiran ini berisi daftar badan-badan sektoral di tiga pilar Masyarakat ASEAN (Politik-Pertahanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya).
Lampiran 2	Pihak-pihak yang Berasosiasi dengan ASEAN	Lampiran ini merangkum pihak-pihak yang berhubungan dengan ASEAN menurut kategori, yaitu: parlemen, organisasi-organisasi bisnis, lembaga <i>think tank</i> dan akademis, organisasi masyarakat sipil terakreditasi, dan para pihak lainnya

		dalam ASEAN.
Lampiran 3	Bendera ASEAN	Lampiran ini berisi makna bendera ASEAN, dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta disainnya
Lampiran 4	Logo ASEAN	Lampiran ini menjelaskan maksud logo ASEAN dan lebih khusus menjelaskan dimensi-dimensi serta disainnya.

Apa Tanggapan Kita untuk Piagam Jakarta?

Piagam ASEAN mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Kalangan Pemerintah di dalam dan di luar ASEAN menganggap penandatanganan Piagam ini sebagai keperluan untuk memperoleh kekuatan hukum atas kesepakatan dan deklarasi ASEAN. Piagam tersebut juga dipandang menambah formalitas ASEAN, dengan adanya aturan-aturan, dan menandakan kepastian ASEAN dalam melaksanakan berbagai kesepakatan menurut peraturan resmi tersebut.

Tetapi banyak organisasi masyarakat sipil yang kecewa karena Piagam ASEAN kurang menjelaskan hal-hal rinci yang penting di banyak soal dan gagal menyediakan ruang partisipasi rakyat. Contohnya, Piagam ini tidak memiliki mekanisme yang jelas tentang penyelesaian sengketa, tanggung jawab dan pemulihannya. Sementara membicarakan ASEAN yang berorientasi rakyat, namun Piagam ini tidak menyediakan mekanisme yang jelas bagi transparansi dan partisipasi. Piagam ini tidak menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan ASEAN dapat menjadi sasaran pengawasan independen, bagaimana warga negara yang berminat dapat berpartisipasi dalam proses-proses resmi ASEAN, dan bagaimana ASEAN menyediakan informasi bagi publik.

Piagam ini memberi kondisi/persyaratan bagi ASEAN yang masih terpusat kepada pemerintah, tapi tidak memasukkan atau menjelaskan kondisi bagi rakyat, khususnya petani, buruh migran, dan perempuan.

Piagam ASEAN menjelaskan keutamaan ekonomi yang didorong pasar. Penciptaan Pasar Tunggal dan basis produksi tampaknya hanya ditujukan untuk menanggapi pasar-pasar yang diliberalisasi, namun tidak banyak memberi perhatian kepada adanya peluang ekonomi lainnya yang mungkin. Hal ini menjadi keprihatinan ketika semua itu bersama Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dibahas berikut ini.

Pembahasan yang paling disambut dalam Piagam ASEAN adalah dimasukkannya hak-hak asasi manusia dalam pembukaan dan pernyataan prinsip, serta pembentukan badan hak-hak asasi manusia. Tetapi badan hak asasi manusia yang menjadi tujuan advokasi masyarakat sipil selama hampir satu setengah dasawarsa ini, belum dibahas. Kerangka acuan badan hak asasi manusia masih harus diputuskan oleh Menteri-menteri Luar Negeri.

Akhirnya kita tahu, proses penyusunan Piagam ini tidak disertai dengan konsultasi yang memadai. Tidak ada draft yang dibagikan sehingga dapat didiskusikan oleh rakyat sebelum draft ini diselesaikan. Hasilnya, peluang bagi masyarakat untuk memberi masukan bagi

penyusunan draft Piagam itu menjadi terbatas. Kini keprihatinan muncul bahwa Piagam tersebut akan diratifikasi tanpa pemahaman rakyat atas dampak keseluruhannya. Demikian pula dengan berbagai mekanisme yang dimandatkan oleh Piagam masih memerlukan penjelasan dan dukungan dari cetak biru atau kerangka acuan terpisah. Hal ini sama dengan menyusun perundang-undangan bagi sebuah konstitusi negara, atau menyusun aturan-aturan untuk hukum (undang-undang) yang telah diberlakukan. Penyusunan cetak biru dan kerangka acuan ini, khususnya bagaimana demokratis dan inklusifnya cetak biru dan kerangka acuan itu, dan seberapa banyak konsultasi dan diskusi yang akan dilakukan – sama pentingnya dengan gagasan-gagasan yang termaktub dalam Piagam itu sendiri.

Apakah Masyarakat Ekonomi ASEAN Itu?

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada kekeluasaan, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan *outsourcing*), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitif oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar tunggal, Cetak Biru Masyarakat

Ekonomi ASEAN melihat bagaimana liberalisasi perdagangan di wilayah ini akan dilaksanakan, dan bagaimana standard-standard umum dikembangkan. Selain itu, kerja sama dan alih teknologi dengan bantuan organisasi-organisasi internasional/regional (seperti *Food and Agricultural Organization/FAO*) dan sektor swasta juga menjadi perhatian ASEAN. Hal ini juga mengundang produsen pertanian melalui promosi dan berjaringan kerja sama pertanian.

Selain pasar tunggal, Masyarakat Ekonomi ASEAN juga melihat sebuah kawasan ekonomi dengan semangat kompetisi yang tinggi, pembangunan ekonomi yang setara, dan integrasi penuh dalam ekonomi global. Pembangunan kawasan kompetitif ini akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan bersama dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk itu, ASEAN akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pajak dan e-commerce. ASEAN akan mendirikan sebuah jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat); mengembangkan sistem ICT yang dapat dihubungkan dan digunakan oleh semua negara di kawasan ini; mencari proyek-proyek untuk jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi; mempromosikan sektor penambangan; dan menarik sektor swasta untuk mendanai upaya-upaya tersebut. Soal kesetaraan akan tercapai terutama melalui pengembangan perusahaan kecil dan medium (*small and medium enterprises*); dan dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara negara-negara ASEAN yang kaya/besar dengan yang miskin/kecil, dan antara ASEAN dengan kawasan lainnya melalui *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*. IAI adalah sebuah proyek yang mengupayakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN agar mampu berpartisipasi penuh dalam integrasi kawasan. Akhirnya, Masyarakat Ekonomi ASEAN mengusahakan keselarasan kesepakatan ASEAN dengan peraturan dan undang-undang multilateral, dan membuat kebijakan yang akan lebih jauh mengintegrasikan kawasan tersebut dengan dunia.

Tabel 3
Unsur Penting Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Ciri-ciri	Unsur Penting
A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi	
<i>Aliran bebas barang-barang</i>	<p><u>Penghapusan Tarif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018) - Sektor-sektor Integrasi Prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV - Tarif Daftar Sensitif (SL) sebesar 0-5% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Viet Nam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1

	<p>Januari 2017 untuk Kamboja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase produk-produk dalam Daftar Pengecualian Umum (<i>General Exceptions List</i>) <p><u>Penghapusan Hambatan-hambatan Non Tarif</u></p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV</p> <p>Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui: Fasilitasi perdagangan, integrasi bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN</p>
<i>Aliran bebas jasa-jasa</i>	<ul style="list-style-type: none"> o Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015 o Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020 o Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEAN Minus X o Pengaturan-pengaturan Pengakuan yang Setara (<i>Mutual recognition arrangements/MRAs</i>)
<i>Aliran bebas investasi</i>	<p>Kawasan Investasi ASEAN (<i>ASEAN Investment Area/AIA</i>) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor, dengan beberapa pengecualian)</p> <p>Pembentukan Kesepakatan Investasi Komprehensif ASEAN (<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA</i>)</p>
<i>Aliran modal yang lebih bebas</i>	<p>Memperkuat Pembangunan dan Integrasi Pasar Modal ASEAN, dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar.</p>
	<p>Fasilitasi pergerakan dan pengkaryaan</p>

<i>Aliran bebas buruh terampil</i>	buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi.
<i>Sektor-sektor Integrasi Prioritas</i>	Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi.
<i>Pangan, Pertanian, dan Kehutanan</i>	<p>Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan, penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standard-standard yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas.</p> <p>Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan sektor swasta.</p> <p>Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN.</p>
B. Kawasan Ekonomi Kompetitif	
	<p>Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual.</p> <p><u>Pembangunan Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; Pasar Aviase/Penerbangan Tunggal ASEAN; Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN - Interkonektifitas dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-commerce - Kerja sama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans-ASEAN atau ASEAN Power Grid/APG)

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang) - Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta <p>Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce</p>
C. Pembangunan Ekonomi yang Setara	
	<p>Cetak Biru kebijakan ASEAN untuk Pengembangan Ekonomi Kecil Menengah 2004-2014</p> <p>Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) – yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia</p>
D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global	
	<p>Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakukannya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN)</p> <p>Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global</p>
IMPLEMENTASI	
Mekanisme Implementasi/Penerapan	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dalam pemberitahuan • Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan • Konsensus • Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa • Rumusan ASEAN-X • Kelonggaran/fleksibilitas
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana komunikasi • Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka • Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan • Website Masyarakat Ekonomi ASEAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pembangunan ASEAN (ADF) • Studi-studi teknis

Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional • Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota • Pengembangan kapasitas untuk anggota baru
Tinjauan	Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN

- ❖ ASEAN-6 terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
- ❖ CLMV meliputi Kamboja, RDR Laos, Myanmar, dan Viet Nam.

Apa Arti Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Kita?

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah tujuan ambisius yang sayangnya dikembangkan tanpa konsultasi berarti dengan sektor-sektor ekonomi yang berbeda di kawasan ini. Sebagai hasilnya, cetak biru yang dirancang untuk mendukungnya bersifat agak teknis dan tidak memberikan pelaku ekonomi umum menemukan peran penting mereka di dalamnya. Pelaku-pelaku ekonomi besar dan bisnis mungkin berada pada posisi untuk mengambil keuntungan dari kebijakan dan proyek-proyek yang diperhitungkan di dalam cetak biru tersebut, namun cetak biru ini kekurangan banyak kebijakan dan proyek lainnya yang dapat membantu produsen dan bisnis/usaha kecil mengatasi integrasi.

Perlu diingat, tidak ada petani dan nelayan kecil disebut di dalam cetak biru ini, dan penyebutan tenaga kerja hanya mengacu kepada para pekerja yang profesional dan berketerampilan tinggi. Pada bagian promosi kerja sama pertanian hanya dipusatkan pada hubungan dan jaringan, mengusulkan kebutuhan mereka untuk berkonglomerasi dan menjadi besar. Bagaimana kerja sama ini dapat dikembangkan untuk mendukung produksi dan meningkatkan pendapatan tidak jelas dibahas.

Masyarakat Ekonomi ASEAN tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan semata-mata dengan sesederhana dan cepatnya liberalisasi. Tidak jelas, apakah keuntungan integrasi kawasan diperuntukkan bagi kawasan ini (ASEAN). Dengan tujuan berselaras dengan aturan-aturan internasional, tampaknya Masyarakat Ekonomi ASEAN hanya sebuah rancangan sehingga anggota ASEAN dapat meliberalisasi lebih cepat. Cetak biru tersebut lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Hanya sektor-sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal (“*made in ASEAN*” = buatan ASEAN), namun tetap saja harus dilihat bagaimana upaya ini berhasil. Sektor-sektor integrasi

prioritas yang diperkenalkan pada awal 2004 dalam VAP, sampai sekarang tidak mencapai kemajuan berarti yang dapat dilaporkan.

Seperti kita ketahui, liberalisasi perdagangan dan investasi dapat berdampak negatif pada ekonomi dan penyerahan tenaga kerja lokal. Banyak penelitian meragukan bahwa liberalisasi akan meningkatkan perdagangan yang membawa kesejahteraan ekonomi lebih tinggi. Penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan tidak secara otomatis mengikuti liberalisasi. Pengalaman Asia Timur dalam krisis keuangan dapat menjadi kehati-hatian bagi kawasan ASEAN ini. Langkah-langkah liberalisasi berskala luas, khususnya dalam modal, dapat menyebabkan terguncangnya aliran modal dan mempengaruhi ekonomi. Hal yang sama juga berlaku pada pembukaan sektor barang dan jasa kepada kompetisi negara-negara lain. Demikian pula, proyek-proyek besar seperti jaringan listrik interkoneksi, promosi bio-fuel (bahan bakar hayati), atau masuknya konsesi pertambangan yang berpotensi menimbulkan (a) penyingkiran komunitas-komunitas akibat proyek-proyek ini; (b) mengancam ketahanan/keamanan pangan dengan mendorong konversi atau penghapusan lahan-lahan pertanian menjadi kawasan industri atau sebagai lahan penanaman tanaman bio-fuel; dan (c) pencemaran sumber daya air dan kerusakan lingkungan. Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak sungguh-sungguh mengakui bahaya ini, bahkan tidak memaparkan rencana yang jelas untuk mengatasi dampak negatif atas liberalisasi dan proyek-proyek integrasi.

Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak memasukkan diskusi bagaimana belajar dari pertumbuhan ekonomi dan pengalaman pembangunan dari negara-negara ASEAN yang lebih maju. Contohnya, cetak biru ini tidak membahas bagaimana dukungan perlindungan diberikan oleh Malaysia, Thailand, dan Indonesia membantu mengembangkan industri mereka; atau bagaimana investasi besar Singapura pada jasa-jasa publik dan infrastruktur penting dalam pembangunan pasar internal negara ini. Cetak biru ini malah membicarakan penghapusan seluruh mekanisme perlindungan tersebut (contohnya persyaratan kinerja dan peraturan nasional menjadi hambatan non-tarif) dan menarik sektor swasta. Sementara menyebutkan perlindungan konsumen dan kebijakan kompetisi, namun cetak biru ini tidak menjelaskannya lebih lanjut. Transparansi dan akses ke informasi, peran serta masyarakat juga tidak dibahas sebagai bagian dari upaya perlindungan ini.

Ada poin-poin tindakan khusus dan jangka waktu kapan kebijakan liberalisasi dibuat, namun cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN ini tidak memiliki pembahasan tentang persyaratan-persyaratan sehingga para anggota dapat mengintegrasikannya dengan tepat. Pendanaan adalah faktor penting dalam memasukkan berbagai proyek ke dalam daftar yang terdapat dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, tetapi tidak ada pembahasan yang memadai, contohnya bagaimana CLMV dapat mengakses sumber daya sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek ini. Cetak biru itu hanya membahas IAI dan Dana Pembangunan ASEAN (*ASEAN Development Fund*) yang keduanya merupakan mekanisme terbatas untuk pendanaan, terutama mencakup proyek-proyek pengembangan kapasitas dan bantuan teknis. Cetak biru ini tidak membicarakan bagaimana anggota-anggota yang lebih kaya membantu atau ikut mendanai proyek-proyek untuk anggota yang lebih miskin. Seperti kita ketahui, anggota-anggota non ASEAN (seperti bank regional, lembaga internasional dan donor bilateral) dalam pendanaan regional ASEAN menyumbang lebih besar daripada anggota ASEAN sendiri. Sementara bantuan ekstra memang diperlukan, sumbangan eksternal dalam jumlah besar yang tidak proporsional untuk pendanaan regional dapat mempengaruhi prioritas-prioritas

pembangunan ASEAN dan anggotanya yang lebih miskin. Artinya, ada kemungkinan proyek-proyek yang akan dilaksanakan adalah proyek-proyek yang mengikuti prioritas para donor.

Selain isu-isu pendanaan masih ada isu-isu yang lebih luas dan mengundang pertanyaan bagaimana solidaritas kawasan ini akan tercapai dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Cetak biru secara khusus menyebutkan penyesuaian peraturan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan peraturan internasional, namun tidak membahas bagaimana kepentingan berbagai negara itu dikelola dan dilindungi dalam kancah aturan main internasional.

Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN memberi berbagai kemungkinan menarik bagi rakyat di kawasan ini. Pengertian komunitas mengacu pada kerja sama dan rakyat secara bersama-sama, bekerja bersama, dan saling membantu. Gagasan Pasar Tunggal dan basis produksi juga dapat bermakna bahwa para produsen ASEAN meningkatkan interaksi dan pertukaran di antara mereka, dan bersikap pada pentingnya saling berkompetisi. Hal ini dapat juga berarti produk-produk kawasan – yang dihasilkan oleh produsen dari negara-negara berbeda – dapat dipromosikan.

Namun, cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bukanlah cetak biru untuk masyarakat. Karena jika Masyarakat Ekonomi ASEAN ingin benar-benar relevan, ia harus berorientasi dan lebih banyak melibatkan rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Tekanan bagi pertumbuhan akan didamba jika motivasinya adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat biasa dan komunitas umumnya. Sebuah masyarakat yang nyata adalah sebuah komunitas yang merangkul rakyat biasa, dan menyatukan aspirasi solidaritas dan kerja sama mereka.

Kesepakatan perdagangan bebas apa yang dimasuki ASEAN? Bagaimana kesepakatan itu mempengaruhi petani?

Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah kerangka ekonomi utama di ASEAN. AFTA diterapkan melalui Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang mencanangkan semua tarif bakal dihapus sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV. Seluruh produk sensitif akan dimasukkan dalam skema tersebut sebelum tahun 2018.

Di samping AFTA, sebagai sebuah kawasan ASEAN juga terlibat dalam tujuh kesepakatan perdagangan bebas lainnya, yaitu:

- * Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) – sebuah Program Panen Awal (*Early Harvest Program*), suatu program untuk mengatur perdagangan buah-buahan dan sayuran. Saat ini program tersebut sedang dilaksanakan di Filipina, Indonesia, dan Thailand; sementara perundingan-perundingan di negara lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.
- * ASEAN-Korea (AKFTA) – perjanjian ini sudah ditandatangani, kecuali oleh Thailand
- * ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) (Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN-Jepang) -- perundingan-perundingan telah diselesaikan dan kesepakatannya diharapkan akan ditandatangani awal 2008.

* ASEAN-India Regional Trade and Investment Area – perundingan-perundingan dalam hal barang diharapkan selesai sebelum Mei 2008

* ASEAN- Australia and New Zealand FTA – perundingan-perundingan ini masih berjalan

* ASEAN – European Union FTA – sebuah deklarasi bersama telah ditandatangani pada November 2007 tetapi perundingan-perundingannya belum dimulai

* East Asia Free Trade Area (EAFTA) – masih dalam konsultasi dan studi/penelitian

AFTA merupakan bagian agak kecil dari perdagangan di dalam ASEAN dan total perdagangan ASEAN, dan tetap dipandang apakah kawasan perdagangan bebas ini akan meningkatkan nilainya sebelum 2015. Kesepakatan dengan negara-negara lain mungkin hanya mencakup lebih sedikit produk dan masa pemberlakuan yang lebih panjang. Lagi pula, petunjuk umum menyebutkan membuka perdagangan dengan negara-negara tersebut secara progresif. Isu utama bagi petani adalah bagaimana kawasan-kawasan perdagangan bebas (FTA) ini berdampak pada pertanian lokal. Contohnya, penelitian awal pada *Early Harvest Program* ACFTA antara ASEAN-China FTA, menunjukkan adanya dampak besar pada petani Thailand dan Indonesia.

Apa keprihatinan utama kita pada pertanian di negara-negara ASEAN?

Pertanian tetap menjadi sektor penting dan sensitif dalam ekonomi di negara-negara ASEAN. Selain Singapura dan Brunei, sumbangan sektor pertanian kepada produk domestik total berkisar 7,9% di Malaysia, sampai 50% di RDR Laos.

Sumbangan pertanian kepada total ketenagakerjaan berkisar dari 16% sampai 78%. Pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian dan pendapatan yang penting bagi penduduk di negara-negara tersebut, khususnya di pedesaan.

Meski jika pertanian tetap menjadi sektor penting dalam ekonomi di banyak negara ASEAN, kita, petani dan produsen kecil laki-laki maupun perempuan, yang merupakan mayoritas masyarakat yang bergantung pada pertanian, masih tetap miskin. Di ASEAN, kemiskinan paling tinggi dan paling tersebar berada di pedesaan, di mana pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakatnya.

Kemiskinan kita terutama disebabkan oleh tidak setaranya distribusi sumber daya, keterbatasan akses ke peluang-peluang ekonomi dan rendahnya partisipasi kita dalam proses-proses pembuatan keputusan.

Integrasi dalam pertanian di negara-negara ASEAN saat ini tidak menguntungkan petani kecil laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, bisnis pertanian besar dan perusahaan transnasional meraup keuntungan besar. Tak dapat dipungkiri, integrasi ini akan menyingkirkan kita, mematikan mata pencaharian kita, dan memusnahkan warisan pedesaan dan masyarakat pertanian di Asia Tenggara. Petani perempuan harus menanggung derita, karena merekalah yang melakukan 50% atau lebih pekerjaan pertanian untuk hampir semua jenis tanaman. Dengan mengantungi penghasilan yang kecil, maka hanya sedikit uang untuk membeli makanan, membiayai kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.

Apa himbauan dan usulan kita untuk ASEAN?

Prinsip-prinsip

Kebutuhan kita sebagai petani kecil laki-laki dan perempuan sebenarnya sederhana: kami ingin keamanan mata pencaharian, lebih nyaman sehingga kami dapat hidup lebih bahagia dan sejahtera.

Kebijakan-kebijakan pertanian ASEAN akan menyumbang kepada upaya-upaya pengentasan kemiskinan, karena pertanian adalah sektor penyerap tenaga kerja sebagian besar rakyat miskin. Kebijakan-kebijakan ini tidak boleh menyebabkan penyingkiran petani dan tidak boleh meningkatkan kerentanan sektor ini. Selain itu, kebijakan-kebijakan pertanian harus mempertimbangkan bahwa pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi keamanan pangan dan kebutuhan pangan pokok yang berkecukupan bagi sebuah negara.

Oleh karena itu, integrasi pertanian harus dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan setiap orang dengan pilihan yang layak bagi masyarakat miskin dan kaum marjinal. Integrasi ini seharusnya setara, inklusif, berkelanjutan, berbasis hak, sensitif gender, dan membawa pemberdayaan bagi rakyat miskin.

Kebijakan

Kita meminta ASEAN untuk mengembangkan kebijakan strategis pertanian yang mengintegrasikan perdagangan dan pembangunan, serta mendorong prinsip-prinsip tersebut di atas. Kebijakan strategis ini dapat dilakukan di tingkat nasional, kemudian meningkat dan diselaraskan di tingkat regional. Kebijakan ini harus mengikuti prinsip-prinsip dan syarat sebagai berikut:

1. Kebutuhan petani kecil laki-laki dan perempuan – lakukan hal pertama yang utama: tanah untuk penggarap. Di Indonesia, banyak lahan pertanian dikuasai oleh negara atau perkebunan-perkebunan besar. Di Filipina, banyak lahan pertanian subur masih dikuasai tuan-tuan tanah yang berhasil mempengaruhi pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kebijakan pertanian ini harus memiliki akses dan kendali kepada sumber daya lahan sebagai prasyarat untuk perdagangan dan pembangunan.
2. Menyediakan jasa pendukung yang mencukupi untuk petani-petani kecil seperti akses ke kredit/modal, teknologi, jaminan tanaman, dukungan harga, serta petani-petani perempuan yang menjadi sasaran.
3. Melaksanakan investasi-investasi infrastruktur yang masif dalam rangka mendukung pertanian skala kecil.
4. Penelitian langsung dan upaya-upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal.
5. Menjamin swasembada tanaman pangan pokok di negara di mana para produsen dibantu untuk menghasilkan pangan yang mencukupi dan memenuhi standard-standard keamanan dan lingkungan, serta di negara-negara yang pemerintahnya mencoba menyelaraskan produksi dan

permintaan, memenuhi kebutuhan tanaman pangan pokok dalam negeri ketimbang memenuhi kebutuhan internasional akan tanaman-tanaman penghasil devisa.

6. Menyediakan liberalisasi dan perlindungan yang sudah ditentukan guna melindungi kerja-kerja dan mata pencaharian produsen kecil, selaras dengan kondisi dan kebutuhan khusus masing-masing negara anggota.

7. Membangun kekuatan domestik baik kaitan ke depan dan ke belakang seraya memusatkan hubungan antara pertanian dan industri pemroses pangan. Kepentingan produsen dan konsumen dapat dipenuhi melalui manajemen perdagangan dan harga yang terjamin sehingga perbedaan harga antara komoditas impor dan lokal tidak terlalu jauh.

8. Menempatkan pertanian berkelanjutan sebagai arus utama melalui penyebaran dan promosi yang gencar. Merumuskan standard-standard produksi dan pemasaran yang adil dan berkelanjutan, contohnya petani dan pedagang didorong untuk menghasilkan dan menjual produk-produk hanya dengan cara yang aman dan berkelanjutan sehingga membawa hasil yang adil bagi petani/produsen kecil.

9. Melembagakan mekanisme partisipasi untuk organisasi tani/produsen baik laki-laki maupun perempuan serta organisasi pembangunan sosial non pemerintah dalam proses pembuatan keputusan ASEAN, contohnya Dewan Tani ASEAN di mana pejabat-pejabat ASEAN dapat berkonsultasi tentang persoalan yang mempengaruhi sektor pertanian. Untuk memastikan partisipasi yang berkualitas, pemerintah negara-negara ASEAN harus:

- menjelaskan istilah-istilah perundingan perdagangan lebih awal agar diskusi-diskusi lebih bermakna
- menyelenggarakan dengar pendapat dan konsultasi publik khususnya dengan petani, nelayan kecil serta kelompok-kelompok masyarakat sipil
- menerjemahkan istilah-istilah yang diusulkan pada perjanjian perdagangan ke dalam bahasa yang tidak teknis dan bahasa lokal
- memberikan perwakilan yang memadai bagi produsen kecil laki-laki dan perempuan dalam badan-badan konsultasi dan pembuat keputusan

Apa yang telah AFA lakukan dalam ASEAN?

AFA memulai terlibat dalam ASEAN pada tahun 2005, ketika AFA bersama mitra strategisnya AsiaDHRRA menyelenggarakan sebuah diskusi “ASEAN dan Pertanian” yang dihadiri Dr. Aumi Mat Makhir, pejabat senior Sekretariat ASEAN. Diskusi ini merupakan salah satu sesi panel yang diadakan pada Konferensi Regional tentang Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam ASEAN yang diselenggarakan oleh sejumlah jaringan regional seperti Forum-Asia, SEACA, Focus on the Global South, dan Institut for Global Justice (IGJ).

Pada awal 2006, ASEAN membentuk kelompok *Emminent Persons Group* (EPG), kelompok pakar, yang bertugas membuat rekomendasi untuk kerangka Piagam ASEAN. AFA bekerja bersama jaringan yang luas, *Solidarity for Asian People's Advocacies* (SAPA), yang kemudian menghasilkan tiga usulan untuk EPG, satu untuk masing-masing pilar ASEAN (pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya). Pada Desember 2006, AFA bekerja sama dengan AsiaDHRRA menyelenggarakan sesi panel “Integrasi Regional ASEAN dalam Pertanian: Apa dan

Bagaimana Seharusnya”. Sesi panel ini diselenggarakan selama Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (*ASEAN Civil Society Conference/ACSC2*) di Cebu, Filipina.

Pada tahun 2007, AFA lebih intensif berhubungan dengan ASEAN melalui penyelenggaraan dua konsultasi regional dan terlibat dalam tiga konferensi masyarakat sipil sebelum KTT Pemimpin ASEAN diselenggarakan di Singapura. Sebuah konsultasi diselenggarakan pada Maret dan memusatkan perhatian pada penyusunan draf piagam, bio fuel, dan perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA). Hasil dari konsultasi ini kemudian dipresentasikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong dan pejabat-pejabat senior lainnya. Pada Desember, konsultasi lainnya juga diselenggarakan untuk memusatkan perhatian pada analisis Piagam ASEAN yang ditandatangani, juga cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan dua pejabat senior Dr. Somsak Pippopinyo dan Dr. Termsak Chalermpananupap. AFA juga berpartisipasi dalam Dewan Rakyat ASEAN (*ASEAN Peoples' Assembly*) yang diselenggarakan oleh ASEAN-ISIS; ACSC 2007 diselenggarakan oleh *Singapore Institut for International Affairs* dan ACSC+3 yang diselenggarakan oleh SAPA.

Apa yang dapat kita lakukan untuk terlibat pada isu-isu Piagam ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan pertanian secara umum?

Untuk kelompok petani dan produsen seperti kita di AFA, kita harus membangun, memperkuat, dan mengkonsolidasikan diri baik di tingkat nasional dan regional sehingga kita dapat menjadi kuat, efektif, bersuara yang punya pengaruh di seluruh tingkatan politik, baik lokal, nasional, maupun regional. Kita mungkin tidak dapat menyamai jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan besar agrobisnis, namun jumlah kita banyak. Kita dapat bersaing, bahkan mungkin bisa melampaui hasrat dan dedikasi mereka, namun bagi kita dedikasi menuju perdagangan yang adil dan berkeadilan, dedikasi untuk menjaga pertanian sebagai mata pencaharian yang tetap layak dan penting.

Bersama kelompok masyarakat sipil yang bertujuan sama, kita dapat bertukar informasi dan pandangan serta mempromosikan kerja sama rakyat-rakyat. Dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah, kita dapat menjalankan proyek dan program produksi tanaman secara berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perdagangan dan pemasaran yang sungguh-sungguh dan adil serta efisien seraya mengembangkan kemampuan kita untuk mengatur diri dan kewirausahaan kita.

Berikut ini langkah-langkah nyata yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi bagaimana ASEAN mengembangkan citranya sebagai sebuah kawasan:

- Mendiskusikan secara mendalam isu-isu dalam Piagam ASEAN, cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kebijakan pertaniannya kepada petani dan produsen kecil laki-laki dan perempuan sebanyak mungkin
- Mengungkapkan keprihatinan kita dengan menuntut dan berpartisipasi dalam konsultasi nasional dan regional tentang Piagam ASEAN dan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
- Berpartisipasi dalam diskusi pada hal-hal yang belum ditentukan dalam Piagam ASEAN, terutama kerangka acuan badan hak asasi manusia, definisi/pengertian peran

dan fungsi organ-organ yang baru terbentuk (contohnya Komite Perwakilan Tetap, Dewan-dewan Komunitas)

- Mendorong kejelasan dan pengertian tentang ruang bagi partisipasi publik dalam ASEAN, dan merekomendasikan mekanisme-mekanisme yang tepat untuk sektor kita (pertanian)
- Mendorong diskusi yang membahas tujuan masyarakat ekonomi selain sekedar liberalisasi, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi khusus
- Merekomendasikan kebijakan dan tindakan khusus untuk mekanisme perlindungan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
- Merekomendasikan kebijakan dan proyek khusus untuk bagian-bagian yang belum ditentukan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu: perlindungan konsumen, kebijakan kompetisi, hak kekayaan intelektual, dan pembangunan kerja sama pertanian
- Terlibat dalam pengembangan cetak biru Politik-Pertahanan dan Komunitas Sosial-Budaya
- Belajar dari kelompok-kelompok petani di kawasan lainnya yang juga bekerja bersama pemerintah mereka
- Terus-menerus membangun dan mendokumentasikan model-model alternatif melalui percobaan lebih lanjut tentang praktik-praktik yang baik dan potensial, serta memperbanyak inisiatif yang telah berhasil diuji coba
- Terlibat dalam ASEAN dalam pengembangan pemantauan yang akan mengukur kinerja para pemerintah ASEAN di bidang perdagangan pertanian, akses dan kepemilikan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, dan partisipasi petani.

KESIMPULAN

Logo ASEAN saat ini menggambarkan 10 tangkai beras dan salah satu tujuan dalam Dokumen Pendiriannya yaitu pembangunan dan pertumbuhan pertanian di wilayah ini.

Sebagai petani kecil laki-laki dan perempuan di wilayah Asia Tenggara, tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana menanggapi berbagai isu yang menghadang di banyak tingkat: di pertanian, di komunitas, nasional, regional, dan global. Sebagai produsen langsung, kita paham bagaimana kita bersuara. Kita menghasilkan pangan yang memelihara masyarakat, dan menjaga tanah tetap produktif. Sebagai sebuah sektor, kita berada di bawah banyak ancaman, termasuk alih fungsi lahan dan dominasi perusahaan agrobisnis besar. Mempertahankan sistem pertanian kecil tetap hidup merupakan tugas besar masa kini di dunia, di mana ukuran besar menjadi unsur penting untuk keberlangsungan hidup. Pertahanan kita adalah kemampuan kita untuk menjawab tantangan lokal dan nasional. Kita akan menjadi lebih kuat jika kita mampu bekerja bersama petani-petani dari seluruh wilayah dan mendorong alternatif-alternatif yang dipercaya dan patut kita perjuangkan.

Penting bagi kita menunjukkan aspirasi kita selain sekedar dapat mengakses pasar, contohnya perlindungan atas tanah dan lingkungan yang memberi kita mata pencaharian, solidaritas dengan petani lain dan sektor-sektor masyarakat lainnya, perlindungan cara hidup petani, dan sebagainya. Meningkatkan interaksi petani-ke-petani dapat juga dilakukan melalui pertukaran informasi dan proyek bersama (contohnya bank benih regional oleh petani guna melawan

dominasi perdagangan benih oleh perusahaan agrobisnis besar; produksi bersama dalam produk-produk pangan penting yang mencakup tahap produksi utama mulai penanaman sampai panen untuk memproses dan pemasaran, dan lain-lain). Aspirasi dan upaya-upaya nyata ini akan memperlihatkan bahwa kerja sama regional dan integrasi dapat kita lakukan bersama-sama rakyat biasa.

PUSTAKA

Charter of the Association of Southeast Asian Nations, Singapore, 20 November 2007.
available online at: <http://www.aseansec.org/AC.htm>

ASEAN (2007). ASEAN Economic Community Blueprint. Available online at:
http://www.13thaseansummit.sg/asean/index.php/web/documents/documents/asean_economic_blueprint

Chandra, A. and Chavez, J. (2008). "Civil Society Engagement with ASEAN: An Overview" in Chandra, A. and Chavez, J. (eds.), *Civil Society Reflections on South East Asian Regionalism: ASEAN@40*, pp. 21-36 (Quezon City: SEACA).

Chandra, A. and Chavez, J. (2008). "People-Centered Economic Solidarity: Beyond the ASEAN Economic Community Blueprint" in Chandra, A. and Chavez, J. (eds.), *Civil Society Reflections on South East Asian Regionalism: ASEAN@40*, pp. 91-106 (Quezon City: SEACA).

Chavez, J. and A. Chandra (2008). *Dilemmas of Competition and Community-Building: Developing Civil Society Response to Regional Trade and Economic Integration*, SEACA Occasional Papers, January.

SAPA – Solidarity for Asian Peoples' Advocacies Working Group on ASEAN (2007). Analysis of the ASEAN Charter. Available online at: <http://www.focusweb.org/analysis-of-the-asean-charter.html?Itemid=94>

AFA. Reclaiming Spaces: Small Men and Women Farmers Defining the Challenge for ASEAN. A paper presented by Mr. Muhammad Nuruddin during the ACSC;3 Conference, Nov 3, 2007, Singapore.

Ofreneo, Rene E. (2006) "Neo-Liberalism and the Working People of Southeast Asia". in Focus on the Global South. /Revisiting Southeast Asian Regionalism, /pp 11-21 (Philippines: Focus on the Global South)

Susunan Redaksi:

Penulis: Jenina Jok Chaves, Koordinator Program Filipina, Focus on the Global South

Editor: Ma. Estrella A. Penunia

Diterbitkan oleh: AFA

Dengan dukungan Agriterra

Rm 206, Partnership Center, 59 C. Salvador St., Loyola Heights, Quezon City , Philippines

www.asianfarmers.org; afa@asianfarmers.org